Nama : Putri Ayu Rasjid

Nim : 10200119094

Kelas : HTN D

RESUME KEDUDUKAN HUKUM DAN FUNGSI PEMERINTAH

1. Kedudukan Hukum

A. Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut :¹⁰

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang.

Pengertian Kedudukan Hukum

Hukum merupakan suatu norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya norma ini harus dipatuhi dan mengikat bagi setiap individu dalam suatu wilayah tertentu. Dengan adanya norma, setiap orang dapat memperjuangkan kepentingannya dalam batasan-batasan yang tidak melanggar aturan dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Sehingga dengan demikian terciptalah kehidupan yang tertib, aman, tentram dapat terwujudkan. Menurut Satjipto Raharjo hukum merupakan :

kaedah yang memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu. Hal ini jelas tampak dalam bentuk perintah dan larangan. Kaedah diwujudkan dalam bentuk petunjuk bertingkah laku. Oleh karena itu kaedah hukum disebut petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi. Kaedah hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat itu. Jika kaedah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan pada otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi. Agar dengan sanksi itu masyarakat diharapkan supaya selalu berada dalam koridor yang baik, serta menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum, guna menciptakan kedamaian dalam masyarakat.¹

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

1Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradat Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

Kedamaian disini merupakan suatu keadaan yang mencakup dua hal, yaitu ketertiban atau keamanan dan ketentraman atau ketenangan. Ketertiban atau keamanan menunjukkan pada hubungan atau komunikasi lahiriah, jadi melihat pada proses interaksi para pribadi dalam kelompok masyarakat. Sedangkan ketentraman atau ketenangan menunjukkan pada keadaan bathiniah, jadi melihat pada kehidupan bathiniah masing-masing pribadi dalam kelompok masyarakat.²

Pengertian hukum di atas dapat diartikan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik dalam masyarakat, bukan hanya hukum satu-satunya norma dalam pengintegrasian, melainkan masih dapat terdapat sarana pengintegrasian lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Penerapan hukum ditujukan kepada manusia dan badan hukum di Negara Republik Indonesia ini, dimana kedua belah aspek tersebut dikatakan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dengan statusnya sebagai subjek hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan dengan statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri. Dari kedudukan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Menurut Salim dan Erlis mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepkan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.³

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa : ⁴

Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepkan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Penjelasan kedudukan hukum dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan hukum itu menyangkut status dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

1Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Mengungkap Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradatan Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

Pengertian dan Jenis Subjek Hukum

Ketika berbicara hukum, yang paling awal ditanyakan adalah untuk apa hukum dibentuk dan siapa yang menerima atau memeberlakukan hukum tersebut, tidak lain ia adalah subjek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁵ Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban subjek hukum dapat dikontrol yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi atas semua perbuatan yang ia lakukan. Jenis subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum.

Manusia sebagai subjek hukum, sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia, bahkan seorang yang masih dalam kandungan ibunya sudah bisa dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris). Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.⁶

Pengertian secara yuridis ada dua alasan yang menyebutkan mengapa manusia sebagai subjek hukum, manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak-hak subjek dan kewenangan hukum artinya kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau sudah kawin, sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami, dan orang yang tidak sehat rohani atau jiwanya.⁷

Selain manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban, badan hukum juga sebagai subjek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, dan ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya. Ia dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Pengadilan. Badan hukum juga dapat dikatakan sebagai *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.⁸

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).⁹ Jenis-jenis hak atas subjek hukum

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

1Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradat Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

tersebut meliputi :

1. Hak legal dan Hak Moral, hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial, dan hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. hak moral lebih bersifat solidaritas atau individu.¹⁰
2. Hak Khusus dan Hak Umum, hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lainnya, dan hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali.
3. Hak Individual dan Hak Sosial, hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki, dan hak sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial.¹¹

Kewajiban sebagai subjek hukum bahwasanya ia harus patuh pada peraturan, norma, mengenai hal apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, serta bertujuan untuk penertiban dan upaya agar terwujudnya cita-cita dari hukum itu sendiri, yang memberikan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu subjek hukum juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai setiap hak-hak subjek hukum lainnya yang ada di dalam masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan apabila hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan.¹²

B.Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.²⁰ Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

11Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Mengungkap Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradat Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Awal mula dibentuknya pemerintah ialah tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan di masyarakat secara umum sehingga, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan lancar.

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah memiliki fungsi pemerintah yaitu:

1. Fungsi Primer

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk itu, dibentuklah birokrasi sebagai “government by bureaus”, pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah ialah yang

26 dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi apapun.

Fungsi primer dibedakan menjadi beberapa hal :

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang entah berupa peraturan pemerintah, ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Sekunder

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

1Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Mengungkap Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradat Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

Fungsi sekunder ialah merupakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pemberdayaan maupun di bidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya ialah semakin meningkat taraf hidup masyarakatnya, maka semakin meningkat pula bargaining position, akan tetapi, semakin integrative masyarakatnya, tentu hal ini akan mengurangi fungsi pemerintah. Fungsi sekunder dibedakan menjadi dua fungsi pemerintah yaitu fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Fungsi ini akan banyak ditemui di negara-negara berkembang sedangkan, untuk Negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar zona aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat baik melalui penyuluhan ataukah sekolah lapangan sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintah. Semakin berkurang sehingga, hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan-tujuan negaranya.²⁴

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

1Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Mengungkap Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradat Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

DAFTAR PUSTAKA

<http://eprints.umm.ac.id/43304/3/BAB%202.pdf>

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/63b4340e73646ce6f4e9abc550a0f852.pdf

20<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19940/4/Chapter%20II.pdf> Diakses tanggal 13 Maret 2017

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017

<http://eprints.umm.ac.id/37517/3/jiptummpp-gdl-iismariaul-50982-3-babii.pdf>

10R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

1Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

2 Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

3 Salim dan Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.76.

4 Ibid, hal. 142.

5 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 245.

6 Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93. 7 Ibid.

8 Simanjuntak, 2015, Hukum Peradat Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 25.

9 Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hal. 102. 10 Ibid. hal. 103.

11 Ibid, hal. 104-105

12 Ibid. hal. 106.

24<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html> Diakses tanggal 13 Maret 2017